

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah dapat melaksanakan tujuan utamanya secara maksimal hanya jika pembangunan ini menerapkan kebijakan dari pemerintah yang berupa adanya kebijakan otonomi daerah yang sudah berjalan secara efektif dimana sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Dalam pemerintahan mempunyai pola hubungan yang berbeda dan baru antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang mana sebelumnya dalam pola sentralistik yang memusatkan seluruh wewenang pada pemerintahan pusat menjadi pola desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi ini merupakan wujud dari adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah di dalamnya memuat hak, kewajiban dan wewenang masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan yang ada di wilayahnya berdasarkan aturan-aturan yang sudah tertulis dalam undang-undang yang berlaku untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan dengan peningkatan dalam perekonomiannya. Dengan adanya penerapan otonomi daerah suatu daerah akan dapat bebas dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus bisa mandiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dalam hal ini, masing-masing daerah dapat dengan bebas menjalankan

setiap kegiatannya melalui potensi yang dimiliki setiap daerah tersebut dalam mendapatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, hal ini menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Berbicara terkait keberhasilan perekonomian yang dicapai oleh suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi masing-masing daerah yang terdiri dari beberapa Kota ataupun Kabupaten. Jika melihat kondisi perekonomian yang harus diketahui terlebih dahulu adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Karena di dalam PDRB memuat secara keseluruhan aktifitas ekonomi. Ketika PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa suatu daerah berhasil dalam mengatur dan

mengelola jalannya perekonomian. PDRB sendiri tidak lepas dari tiga pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Mengingat PDRB merupakan fungsi dari PAD, adanya peningkatan PDRB merupakan kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan PAD. PDRB juga tidak terlepas dengan adanya penduduk, di mana penduduk merupakan penggerak utama dari PDRB. Para ahli di ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan komponen input berpotensi yang dapat dijadikan sebagai faktor produksi dalam meningkatkan hasil output produksi suatu rumah tangga dan perusahaan. Jadi semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dapat digunakan (Asmuruf dkk, 2015).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Jumlah penduduk menunjukkan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi disertai dengan perubahan teknologi akan mendorong naiknya tabungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasanya, maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Seperti yang telah dijelaskan oleh (Kuncoro, 2014) dalam bukunya bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah

suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Oleh karena itu, peran dan kedudukan jumlah penduduk sangat penting dan dapat memberikan dampak positif, yaitu akan menciptakan adanya peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan kemudian akan mengarah pada adanya kesempatan kerja sehingga akan menurunkan angka pengangguran dan dalam jangka panjang. Penduduk mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berupa sumbangan pajak dan retribusi ke daerah, sehingga pendapatan asli daerah akan relatif lebih tinggi.

Dengan meningkatnya aktivitas penduduk akan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang berlebihan ini akan memicu terjadinya inflasi. Adanya inflasi di suatu daerah menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10% apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan dan Susanto, 2014).

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian

salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2016). Tetapi dengan adanya inflasi upah atau gaji mengalami kenaikan, karena upah riil tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian (Simanjutak dalam Halim, 2016) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap.

Proses pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Kabupaten dan kota se-Eks Karesidenan Surakarta)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menganalisis apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk menganalisis apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah, dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

### b. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap mampu menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang pendapatan asli daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pembelajaran dalam melakukan analisis serta memberi solusi terhadap permasalahan- permasalahan riil lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disampaikan dalam lima bagian, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memuat landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

## BAB III: METODA PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: Jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

## BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian, yang menyajikan: Deskripsi data penelitian, hasil analisis data, hasil uji hipotesis dan pembahasan.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta keterbatasan-keterbatasan dari proses dan penyusunan penelitian.